

**PERAN PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM  
MENCAPAI GRADUASI SEJAHTERA MANDIRI  
(STUDI PADA PENDAMPING SOSIAL DENGAN LATAR BELAKANG  
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN NONKESEJAHTERAAN SOSIAL)**

**Dewi Komalasari**

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Indonesia  
[dewie.komalasari@gmail.com](mailto:dewie.komalasari@gmail.com)

**Fentiny Nugroho**

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Indonesia  
[fentiny2015@gmail.com](mailto:fentiny2015@gmail.com)

**Abstrak**

*Kemiskinan merupakan suatu permasalahan multidimensi yang diatasi dengan berbagai strategi penanganan. Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pendekatan pembangunan sosial sebagai salah satu instrumen untuk mereduksi kesenjangan dan kemiskinan yang didalamnya terdapat pendamping sosial sebagai tenaga profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran pendamping sosial dalam mencapai graduasi sejahtera mandiri dengan keterkaitan latar belakang pendidikannya serta keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mendukung peran pendamping sosial. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, wawancara mendalam dan observasi. Pada hasil penelitian ditemukan peran pendamping sosial PKH dalam memberikan materi, informasi, motivasi, pelatihan sederhana, melakukan pemantauan terhadap data transaksi bantuan sosial, kondisi ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan anggaran usaha KPM. Keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan yakni terdapatnya perbedaan dalam melakukan engagement untuk membangun trust, asesmen didalam kelompok, networking sebagai upaya pemberdayaan ekonomi, inisiatif kolaborasi dalam pembentukan kelompok usaha. Perbedaan tersebut nampak pada Pendamping Sosial PKH dengan latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial dan nonkesejahteraan sosial, serta Pendamping Sosial PKH nonkesejahteraan sosial dengan memiliki pengalaman sebagai relawan sosial. Kemudian terdapat keterlibatan Pemerintah Daerah yaitu terdapatnya program Jakpreneur, pengawasan serta dukungan sarana dan prasarana bagi pendamping sosial PKH.*

*Kata Kunci: Graduasi Sejahtera Mandiri, Keterlibatan Pemerintah Daerah, Latar Belakang Pendidikan, Pendamping Sosial PKH*

**Abstract**

*Poverty is a multidimensional problem that can be overcome by various coping strategies. Hope Family Program (Program Keluarga Harapan/PKH) with a social development approach as one of the instruments to reduce inequality and poverty in which there are social assistants as professionals. This study aims to describe the role of social assistants in achieving independent prosperous graduation with regard to their educational background and the involvement of the local government in supporting the role of social assistants. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Data gathering techniques include document search, in-depth-interview and observation. The results of the study found the role of PKH social assistants in providing material, information, motivation, simple training, monitoring social assistance transaction data, the economic conditions of family beneficiaries (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) and the KPM's business budget. The connection is that there are differences in engagement*

Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi pada Pendamping Sosial dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)

*to build trust, assessments within groups, networking as an effort to empower the economy, collaborative initiatives in forming business groups. This difference can be seen in PKH Social Assistants with an educational background in social welfare and non-social welfare, and PKH Social Assistants with non-social welfare experience as social volunteers. Then the involvement of the Regional Government, namely the existence of the Jakpreneur program, supervision and support for facilities and infrastructure for PKH social assistants.*

*Keywords: Educational background, Independent Prosperous Graduation, Local Government Involvement, PKH Social Facilitator*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan isu strategis yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dari berbagai sektor pembangunan.<sup>1,2</sup> Adanya kemiskinan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan sosial pada lapisan masyarakat yang mengakibatkan masalah-masalah sosial lainnya bermunculan. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial salah satunya dengan kebijakan perlindungan sosial yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH diharapkan dapat mereduksi kemiskinan dan kesenjangan melalui serangkaian kegiatan sehingga terjadinya perubahan perilaku yang lebih baik pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menciptakan kemandirian pada KPM dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta berkelanjutan.<sup>3,4</sup>

Tenaga Pelaksana Sumber Daya Manusia PKH mencapai 39.438 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dengan komposisi Koordinator sejumlah 782 orang, Administrator Pangkalan Data sejumlah 1.950 orang dan Pendamping Sosial PKH sejumlah 36.706 orang. Penerima bantuan berjumlah 10.000.0000 orang, maka setiap satu Pendamping Sosial mendampingi kurang lebih 272 orang penerima bantuan.

Pada tahun 2020 graduasi KPM PKH mencapai 132% dari target yang telah ditentukan. Namun demikian, dari jumlah 1.321.372 penerima bantuan yang telah digraduasi, sebanyak 73% atau 1.810.098 penerima bantuan adalah graduasi alami dan sisanya hanya 27% yang termasuk kedalam graduasi sejahtera mandiri. Artinya graduasi yang dikatakan sebagai angka kinerja tidak menunjukkan 100% graduasi sejahtera mandiri melainkan terdapat graduasi alami.

Peran pendamping dengan kerangka *Value, Knowledge dan Skill* sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat PKH. Pendamping Sosial dari latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial sejumlah 1.892 orang atau 5% dari seluruh jumlah Pendamping Sosial PKH, dan pendamping dari latar belakang pendidikan nonkesejahteraan sosial sejumlah 34.096 orang atau 95% dari seluruh jumlah Pendamping Sosial PKH. Artinya bahwa

---

<sup>1</sup> Afrilliana, Nadia. "Pengaruh Motivasi, Kompensasi, dan Kompetensi terhadap Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan di Sumatera Selatan." *Motivasi* 1.1 (2016): 79-94.

<sup>2</sup> David, Prima Darwin. *Praktik Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan untuk Graduasi Mandiri dari Status Kepesertaan*. Diss. Universitas Andalas, 2020.

<sup>3</sup> Firmansyah, Dinata, dan Fentiny Nugroho. "Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Tangerang Selatan." *Pekerjaan Sosial* 20.2 (2021).

<sup>4</sup> Habibullah, Habibullah. "Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 16.2 (2011).

Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi pada Pendamping Sosial dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)

terdapat berbagai tenaga profesional tidak hanya dari kesejahteraan sosial melainkan juga dari berbagai profesi lainnya seperti guru, bidan, manajemen, dan lain sebagainya.

Meskipun telah dikeluarkan UU no. 14/2019 tentang Pekerja Sosial, masih terdapat pemahaman yang berbeda di antara berbagai *stakeholder* tentang Pekerja Sosial sebagai profesi. Beberapa miskonsepsi antara lain tentang pengertian pekerjaan sosial, luas lingkup, kompetensi dan kualifikasi yang tidak sejalan dengan UU tersebut.<sup>5,6</sup> Hal ini juga terlihat antara lain dalam proses rekrutmen Pendamping Sosial PKH.

Kota Jakarta Timur pada tahun 2020 memiliki angka tertinggi dalam melakukan graduasi di DKI Jakarta. Graduasi yang telah dilakukan di Jakarta Timur merupakan angka terbesar di Provinsi DKI Jakarta sejumlah 4.241 Penerima bantuan, namun pada kenyataannya juga banyak jumlah penerima bantuan yang masa kepesertaannya lebih dari 5 tahun belum digraduasi sejumlah 10.905 Penerima bantuan atau 50% dari seluruh jumlah penerima bantuan dari tahun 2008 s.d 2016. Diketahui pada tahun 2020 Jumlah pendamping di Jakarta Timur sebanyak 55 orang. Sebaran serta latar belakang pendidikan pendamping sosial PKH yang menunjukkan bahwa terdapat 55 pendamping sosial dan 10 di antaranya memiliki latar belakang kesejahteraan sosial, 45 di antaranya memiliki pendidikan nonkesejahteraan sosial. Pendamping dengan latar belakang kesejahteraan sosial ditempatkan pada 7 kecamatan, sementara 3 kecamatan lainnya tidak terdapat pendamping berlatar pendidikan kesejahteraan sosial.

Pendamping sosial dengan pendidikan kesejahteraan sosial dan nonkesejahteraan sosial di Jakarta Timur telah memperoleh Bimbingan pemantapan pada tahap awal setelah dinyatakan lulus seleksi untuk pengenalan PKH dan tugas-tugas mereka terhadap penerima bantuan. Setelahnya mereka diberikan bimbingan teknis P2K2 untuk memberikan edukasi, informasi, dan melaksanakan peran lainnya sesuai kebutuhan penerima bantuan.<sup>7,8</sup> Pada prosesnya, juga dilakukan *coaching* oleh Koordinator Kota untuk menampung keluhan, aspirasi dan mencari

---

<sup>5</sup> Kiswati, Ayu. "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin melalui Kegiatan Rutin Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2k2) Kelurahan Blotongan, Sidorejo, Salatiga. Tahun 2020." (2020).

<sup>6</sup> Krefting, Laura. "Rigor in Qualitative Research: The Assessment of Trustworthiness." *The American journal of occupational therapy* 45.3 (1991): 214-222.

<sup>7</sup> Priyantiningtyas, Lailia. "Evaluasi Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Mewujudkan Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2013." *Majalah Ilmiah Dian Ilmu* 14.1 (2018).

<sup>8</sup> Purwanto, Slamet Agus, Sumartono Sumartono, dan Muhammad Makmur. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)." *Wacana Journal of Social and Humanity Studies* 16.2 (2013): 79-96.

Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi pada Pendamping Sosial dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)

solusi atas permasalahan yang tidak dapat diatasi ataupun sebaliknya saling bertukar informasi tentang kondisi penerima bantuan di masing-masing kecamatan.<sup>9,10</sup>

Ironisnya, masih banyak penerima bantuan yang belum tergraduasi sejahtera mandiri. Dengan keberagaman pendidikan yang dimiliki pendamping sosial, seharusnya mereka dapat saling melengkapi satu sama lainnya untuk memberikan perhatian intensif kepada para penerima bantuan tentang apa yang dibutuhkan dan cara mengatasinya agar mereka dapat memperbaiki taraf hidupnya dan keluar dari kepesertaan PKH dengan status graduasi sejahtera mandiri.<sup>11,12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, mengindikasikan bahwa pendamping sosial PKH belum menjalankan tugas dengan maksimal dan kurang melihat peluang terhadap kapasitas internal yang dapat dipergunakan dalam mempercepat terjadinya graduasi sejahtera mandiri. Penelitian ini akan dilaksanakan untuk melihat bagaimana peran pendamping sosial PKH secara umum dalam mencapai graduasi sejahtera mandiri dan mengenai bagaimana keterkaitan latar belakang pendidikan pendamping sosial PKH dalam melaksanakan perannya untuk mencapai graduasi sejahtera mandiri serta bagaimana Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mendukung peran pendamping sosial PKH dalam mencapai graduasi sejahtera mandiri.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif membentuk kenyataan sosial, makna budaya dan berfokus pada proses dan peristiwa interaktif sehingga peneliti dapat melihat, memperoleh informasi dan data serta memahami lebih jelas aspek-aspek penting mengenai peran pendamping yang memiliki beragam latar belakang pendidikan yang melaksanakan tugas-tugasnya pada setiap tahapan Program Keluarga Harapan untuk mencapai graduasi sejahtera mandiri di Kota Jakarta Timur.<sup>13</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yakni ingin menyajikan gambaran sistematis dengan detail spesifik dari suatu situasi, aktivitas, latar sosial, atau hubungan dan untuk menggambarkan berbagai situasi dan kondisi yang menjadi objek dalam penelitian ini dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam menggambarkan lebih dalam mengenai situasi sosial tertentu.

---

<sup>9</sup> Maulidah, Nisrina. *Implementasi Teknis Graduasi KPM PKH Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Grogol Utara Jakarta*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>10</sup> Nafatilona, Lidya. *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Administrasi Jakarta Utara*. Universitas Indonesia, (2011).

<sup>11</sup> Narayan-Parker, Deepa, ed. *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. World Bank Publications, 2002.

<sup>12</sup> Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th ed.)*. Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, (2014).

<sup>13</sup> Neuman, W. Lawrence. *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi 7. Jakarta: Indeks, (2013).

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dalam rangka memperdalam informasi, proses dan situasi sosial tertentu yaitu menitikberatkan pada peran yang dilakukan pendamping dengan pendidikan kesejahteraan sosial dan nonkesejahteraan sosial dengan lokus penelitian yang telah ditentukan dengan memilih informan kunci yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu observasi untuk melihat dan mendalami situasi sosial tertentu secara langsung untuk mendukung pengetahuan baru tentang objek atau fenomena yang diteliti sebagai sumber data yang akan dianalisis selanjutnya, sehingga observasi dibutuhkan untuk melihat kenyataan sosial dalam situasi tertentu terhadap objek yang sedang diteliti. Kemudian, dokumentasi yakni dilakukan dengan meminta sejumlah data dukung riset seperti petunjuk teknis, pedoman, Standar Operasional Prosedur, laporan pendamping, jadwal P2K2 yang dilakukan oleh pendamping serta data dukung terkait KPM yang sudah graduasi sejahtera mandiri. Selanjutnya, adalah wawancara mendalam yakni menurut Neuman (2014) wawancara mendalam dilakukan antara lain dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pedoman pertanyaan yang telah dibuat sebelum pengumpulan data lapangan. Peneliti sebelum ke lapangan membuat instrumen penelitian terlebih dahulu yang berisi poin-poin penting pertanyaan untuk menjawab tujuan penelitian.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) *Open Coding* (Pengkodean Terbuka) yaitu tahap ini untuk mengurangi data berserakan atau data mentah hasil pengumpulan data sehingga lebih mudah untuk diolah dan mengambil data yang relevan. (2) *Axial Coding* (Pengkodaan Axial) yaitu fokus utama adalah pada kumpulan kode yang sudah dilakukan pada tahap *open coding* untuk disusun menjadi struktur yang disesuaikan dengan konsep dan tema awal. Kemudian (3) *Selective Coding* (Pengkodean Selektif) yaitu tahapan ini mengambil kode yang telah terorganisir pada tahapan axial coding kemudian meninjaunya kembali kedalam tema dan konsep sentral, dengan menambahkan dan menguraikan hasil empiris. Setelah tahap *selective coding* dilaksanakan, maka peneliti menyusun hasil penelitian kedalam bentuk laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Peran Pendamping Sosial PKH dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri

Pendamping Sosial telah melakukan penyampaian materi sesuai modul yang dilakukan sendiri atau dibantu oleh ketua kelompok KPM, pemberian informasi dan motivasi usaha dan upaya penyadaran bahwa bantuan sosial sifatnya sementara, kemudian Sebagian Pendamping Sosial juga telah memberikan pelatihan sederhana terkait pembukuan, laporan dagang melalui HP, serta dalam hal Kesehatan dan penggunaan komputer.

Menurut Ife peran edukatif dalam rangka memberikan dukungan sepanjang proses pengembangan masyarakat, seorang *community worker* memiliki kemampuan mentransfer pengetahuan kepada anggota, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Upaya pemberian materi, informasi dan pelatihan sederhana yang telah dilakukan pendamping menunjukkan bahwa Pendamping Sosial PKH telah melakukan peran edukatif.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Pendamping sosial PKH sudah pada taraf memberikan informasi terkait bisnis proses PKH, dan kewirausahaan berdasarkan pengembangan modul ekonomi kepada KPM PKH. Informasi juga diberikan keada pihak-pihak lainnya yang terkait pada lingkup RT/RW dan kelurahan sebagai wilayah kerja pendamping sosial PKH. Dengan keterampilan tersebut, maka KPM lebih mengerti dan dapat memahami posisinya didalam bantuan PKH dan bantuan sosial lainnya, serta hak dan kewajibannya didalam PKH. Hal ini disampaikan beberapa Pendamping, dengan memberikan informasi tersebut, maka hal itu yang membedakan KPM PKH dengan penerima program lainnya.

Keterampilan membangun kesadaran menurut Ife yaitu kemampuan menjadikan anggota menjadi aktif dengan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam struktur dan perubahan sosial. Hal ini sudah dilakukan oleh Pendamping Sosial PKH meskipun dirasa belum maksimal karena masih ada KPM yang ketergantungan dengan bantuan sosial PKH. Namun demikian, didalam setiap pertemuan baik P2K2 ataupun *home visit* selalu disisipkan upaya untuk membangun kesadaran KPM PKH agar memiliki pengetahuan, keterampilan sebagai *life skill* mereka dalam menjalankan fungsi sosial lebih baik dan membantu perekonomian keluarga.<sup>15,16</sup> Pada dasarnya, tidak semua Pendamping Sosial PKH memahami dalam menumbuhkan kesadaran disini melainkan beberapa memahaminya dalam sudut pandang memberikan pemahaman kepada KPM dengan tujuan agar KPM tidak mengeluh jika bantuan sosialnya tidak cair pada tahap selanjutnya karena bantuan social bukan gaji dan memberikan pemahaman untuk keluar dari program PKH tanpa paksaan. Sehingga pada beberapa pendamping memberikan pemahaman lanjutan yaitu memberikan saran kepada KPM untuk berjaga-jaga dari kemungkinan tersebut, maka KPM disarankan untuk memiliki usaha. Artinya, bahwa hanya beberapa Pendamping Sosial PKH yang melaksanakan keterampilan menumbuhkan kesadaran secara optimal kepada KPM hingga terbentuknya pandangan dan sikap wirausaha.

---

<sup>14</sup> Ife, Jim. *Community Development in an Uncertain World*. Cambridge University Press, 2013.

<sup>15</sup> Rahmawati, Evi, dan Bagus Kisworo. "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* (2017): 161-169.

<sup>16</sup> Ramadhani, Putri Erika, dan Nandang Mulyana. "Peran Pendamping Dalam Pengembangan Usaha Kelompok Binaan Program Keluarga Harapan (PKH)(di Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2.1 (2020): 64-73.

Selanjutnya, keterampilan yang dimiliki yaitu memberikan pelatihan sesuai *Ife Training* yaitu kemampuan *community worker* untuk menjadi pelatih terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh anggota kelompok. Meskipun hanya bersifat pelatihan sederhana, namun hal tersebut dapat membangun kesiapan para KPM dalam melakukan hidup sehat, melakukan pencatatan dalam usaha yang dilakukan, serta memberikan makna pembelajaran bagi anak dari KPM PKH untuk turut membantu orang tuanya dalam penggunaan komputer. Pendamping Sosial PKH melakukan pelatihan untuk KPM sebagai pengembangan dari materi didalam modul P2K2.<sup>17</sup> Hal ini berupa praktek yang dilakukan misalnya pada modul ekonomi makan adanya pembuatan pembukuan sederhana, terkait sanitasi lingkungan, pemberian ASI dan pengasuhan bayi. Selain itu juga sudah ada pelatihan komputer sederhana dan penggunaan *handphone* yang diberikan untuk KPM anggota KUBE Jasa, untuk membuat daftar harga dan laporan sederhana. Untuk pelatihan sebagai pengembangan modul dilakukan semua pendamping, namun dalam hal kewirausahaan hanya beberapa pendamping melaksanakannya.

Kemampuan motivasi Pendamping Sosial PKH dalam memberikan gambaran kepada para KPM, memberikan cerita-cerita *success story* serta dengan pendekatan agama yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa Pendamping Sosial juga sudah melaksanakan keterampilan animasi sosial. Menurut *Ife* peran fasilitatif merupakan salah satu peran yang ditampilkan oleh *community worker* dalam pengembangan masyarakat, yakni peran tersebut dilakukan dalam rangka memberikan dukungan dan stimulasi kepada masyarakat atau kelompok sasaran sebagai salah satu cara untuk mempercepat terjadinya aksi dan membantu sepanjang proses pertolongan. Pendamping Sosial PKH dengan latar belakang Pendidikan kesejahteraan sosial dan non kesejahteraan sosial telah melaksanakan peran tersebut sesuai dengan hasil penelitian. Pemberian motivasi, afirmasi kepada KPM PKH dilakukan oleh pendamping sosial PKH pada level intervensi Mikro sesuai pemikiran *Adi* yaitu level Mikro dengan sasaran unit intervensinya adalah individu, kelompok dan keluarga, pada level ini model intervensi yang dilakukan adalah *individual/ family casework* dan *groupwork*. Secara individu biasanya dilakukan *home visit* sebagai rutinitas dari pekerjaan mereka, juga melalui kelompok yaitu Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2). Mereka memberikan motivasi kepada KPM agar mereka termotivasi dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan selama menjadi peserta PKH. Pemberian motivasi ditujukan agar KPM memiliki keinginan keluar dari kemiskinan, tidak bergantung dengan bantuan sosial PKH serta memiliki usaha mandiri. Didalam proses motivasi yang diberikan oleh pendamping tentunya menjadi penguat para KPM PKH untuk meyakini

---

<sup>17</sup> Sompie, Maulida Eka Putri. "Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Serut." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 1.3 (2022): 93-102.

keinginannya untuk usaha, untuk memperoleh tambahan pendapatan didalam keluarga dan tidak bergantung dengan bantuan sosial PKH.

Pemantauan yang dilakukan oleh para Pendamping Sosial PKH terkait dengan pemantauan data transaksi, pemantauan kondisi ekonomi KPM dan pemantauan anggaran usaha. Pemantauan data transaksi termasuk didalam tugas Pendamping Sosial PKH, yang dilaksanakan setiap satu sampai dengan tiga bulan sekali. Dalam kegiatan ini, mereka melakukan rekonsiliasi kepada pihak perbankan dan menelusuri data-data yang dianggap tidak sesuai *recordnya*. Melakukan *research* merupakan keterampilan yang perlu dimiliki oleh *Community Worker*, namun dalam hal ini pemantauan merupakan bagian dari evaluasi proses yang dilakukan Pendamping Sosial PKH, tanpa menggunakan kaidah atau metode penelitian. Mereka melakukan proses pemantauan terhadap data transaksi, sebagai bagian dari tugas yang dimandatkan dari Kementerian Sosial. Ada keterampilan dasar yang semestinya dikuasai oleh *Community Worker* diantaranya adalah keterampilan melakukan riset atau investigasi. Investigasi dilakukan sebagai bagian dalam mengecek kembali kebenaran dan kebutuhan dari para KPM penerima bantuan sosial PKH.<sup>18,19</sup> Hal ini sangat tergantung dari pengetahuan dan perspektif yang dimiliki oleh para Pendamping Sosial PKH.

Dalam melaksanakan proses pemantauan data transaksi, keterampilan teknis sangat dibutuhkan yaitu dalam penggunaan komputer sesuai Ife bahwa keterampilan komputer merupakan salah satu dari peran teknis yaitu kemampuan dalam teknologi komputer yang dapat digunakan untuk membantu mengembangkan kemampuan literasi teknologi kepada anggota kelompok atau komunitas. Pada dasarnya penggunaan computer bagi Pendamping Sosial PKH merupakan hal yang mutlak dan merupakan keseharian dalam menjalankan tugas-tugasnya. Permasalahan memang sering terjadi dengan bantuan sosia ini terkait masalah data dan KPM PKH, terlebih lagi jika berkaitan dengan pemangku kepentingan pada level daerah. Menelusuri masalah sama dnegan melakukan investigasi sehingga pada akhirnya ditemukan benang merah dari permasalahan yang muncul. Hal ini berkaitan pula dengan pelaporan yang harus dibuat oleh para Pendamping Sosial sebagai bentuk akuntabilitas atas kinerja mereka.<sup>20</sup> Didalam proses investigasi yang dilakukan maka terdapat pula keterampilan dalam melakukan komunikasi personal. Komunikasi dibangun kepada pihak-pihak yang terlibat dlaam hal ini perbankan,

---

<sup>18</sup> Adi, Isbandi Rukminto. "Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat." (2015).

<sup>19</sup> Suleman, Syahputra Adisanjaya, dan Risna Resnawaty. "Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.1 (2017): 88-92.

<sup>20</sup> Suradi, Suradi, dan Benedictus Mujiyadi. "Kinerja Pendamping Sosial pada Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Tarakan." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 7.3 (2018): 130-145.

kelurahan, Ketua RT/RW, Kader lingkungan dan lainnya. Sehingga peran fasilitatif juga telah dilakukan oleh para Pendamping Sosial PKH. *Personal Communication* yaitu kemampuan berbicara dan berkomunikasi dengan individu, group lainnya merupakan sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh *community worker*. Sehingga didalam melakukan pemantauan terhadap data transaksi ini beberapa keterampilan menurut Ife memang digunakan didalam prosesnya.

Selanjutnya adalah melakukan pemantaun terhadap kondisi ekonomi KPM PKH yang dianggap potensial. Potensial diartikan bahwa KPM sudah mulai memiliki motivasi, semangat untuk berwirausaha dan berpotensi memiliki penghasilan tambahan didalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Pemantauan dilakukan sebelum dilakukannya graduasi. Terminasi menurut Kirst Ashman yakni berakhirnya hubungan antara pekerja sosial dan klien dikarenakan tujuan dari intervensi sudah tercapai.<sup>21</sup> Berakhirnya hubungan pekerja sosial dan klien mengindikasikan proyek yang telah usai, keterbatasan anggaran, dan telah tercapainya tujuan yang diharapkan terjadi pada klien sehingga sudah tidak ada lagi kontak antara Pekerja Sosial dan klien. Tujuan intervensi dalam pendampingan kepada KPM PKH yakni sudah terbangunnya *mindset* dan perubahan perilaku sesuai tujuan P2K2, dan terbangunnya kemandirian serta meningkatnya kondisi sosial ekonomi KPM PKH. Dengan dilakukannya monitoring terhadap KPM potensial, meminimalisir kesalahan Pendamping Sosial PKH dalam melakukan terminasi serta menjadikan Pendamping lebih mengetahui Langkah *follow up* yang dibutuhkan KPM PKH. Menurut Suharto monitoring sebagai aktivitas berkelanjutan yang dimaksudkan untuk memberikan informasi terhadap perencana dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam tahap implementasi.<sup>22</sup> Proses evaluasi menjadi bagian dalam tahapan dalam melakukan intervensi pekerjaan sosial menurut Ashman yaitu merupakan penilaian terhadap keefektifan rencana dan implementasinya. Tugas yang perlu dilakukan sebelum dilakukannya terminasi.<sup>23</sup>

Pemantauan terhadap anggaran usaha yang telah dijalankan oleh KPM PKH, merupakan bagian dari keterampilan manajemen dan kontroling terhadap budget yang dimiliki. Sesuai dengan Ife keterampilan *management* yaitu bermanfaat untuk anggota komunitas dalam mengelola proyek yang akan dilaksanakan sehingga lebih terarah dan akuntabel. Kemudian keterampilan dalam *financial control* yakni kemampuan yang penting dalam proses pemberdayaan untuk pencatatan dalam pengeluaran dan mengontrol *budget*.

---

<sup>21</sup> Kirst-Ashman, Karen Kay. "Human behavior, communities, organizations, dan groups in the macro social environment." (*No Title*) (2008).

<sup>22</sup> Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung: PT.Refika Aditama, (2005).

<sup>23</sup> Utami, Isti Putri, dkk. "Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung." *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 5.1 (2021): 19-25.

Pendamping Sosial PKH melakukan pemantauan terhadap data transaksi, kondisi KPM dan anggaran usaha termasuk dalam melakukan peran teknis, peran fasilitatif menurut Ife, sehingga dalam satu kegiatan yang dilaksanakan pendamping sebenarnya sudah terdapat beberapa peran menurut Ife.

Pendamping Sosial PKH melakukan mediasi terkait persoalan yang dialami oleh KPM PKH dan Anggota keluarga dari KPM PKH. Baik terkait urusan bantuan sosial PKH, komplementaritas program juga berkaitan dengan permasalahan seperti pelecehan seksual yang dialami oleh anak dari KPM PKH dan jika tidak teratasi maka akan mengganggu proses bisnis PKH dikarenakan salah satu kewajiban dari anggota keluarga KPM PKH adalah mengakses layanan Pendidikan atau bersekolah.

Melakukan mediasi menurut Ife yaitu kemampuan mendengar kedua belah pihak untuk melihat pandangan dari masing-masing kemudian mencari kesamaan atau titik temu untuk mencapai kesepakatan. Sementara menurut Suharto Pekerja Sosial sebagai mediator sangat erat kaitannya dalam paradigma generalis.<sup>24</sup> Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain melakukan negosiasi, mendamaikan dan berbagai macam resolusi konflik dilakukan untuk mencapai *win-win solution*. Pendamping Sosial PKH melaksanakan mediasi dalam urusan bantuan sosial terkait saldo nol, KPM pindah alamat, komplementaritas program, perbedaan komponen didalam bantuan, serta kasus-kasus yang dialami oleh anak-anak dari KPM PKH dan aksesibilitasnya pada fasilitas Pendidikan. Pendamping Sosial PKH berdasarkan penelitian menekankan kepada bisnis proses PKH dimana para KPM dan anggota keluarga KPM harus memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas Pendidikan, misalnya anak-anak KPM harus bersekolah, sekalipun ada kasus atau hal-hal yang menyebabkan putus sekolah maka Pendamping Sosial PKH sangat perhatian terhadap hal tersebut. Hal ini dikarenakan PKH sebagai program CCT dengan pendekatan pembangunan sosial menekankan kepada investasi manusia selain hanya memberikan bantuan sosial secara cuma-cuma.

Sebagai pekerja sosial generalis sangat erat kaitannya dengan *empowerment* yakni proses peningkatan kekuatan pribadi, interpersonal, atau politik sehingga individu dapat mengambil Tindakan untuk memperbaiki kehidupan mereka, karenanya peran yang ditampilkan oleh Pendamping Sosial PKH dalam hal ini adalah peran fasilitatif dan representatif.<sup>25,26</sup>

---

<sup>24</sup> Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta, (2020).

<sup>25</sup> Khoiriyah, Nur. "Graduasi Mandiri: Bentuk Keberdayaan Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati." *Komunitas* 10.2 (2019): 143-156.

<sup>26</sup> Sahib, Munawwarah. "Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa." *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 1.2 (2021): 1-13.

Kolaborasi yang dilakukan merupakan bentuk bekerja bersama dengan sesama Pendamping Sosial PKH juga dengan mitra lainnya dalam bentuk *sharing* masalah, pengalaman, penyelesaian masalah, hingga urusan dalam meningkatkan kapasitas KPM PKH baik pengetahuan untuk menjalankan usaha, keterampilan usaha, permodalan dan pemasaran. Hal ini diawali dengan kepercayaan diri yang tanamkan oleh Pendamping Sosial PKH kepada KPM dengan memberikan pengetahuan, memberikan semangat dan motivasi sehingga mereka akhirnya berani untuk usaha, demikian juga Pendamping Sosial PKH pada akhirnya berani untuk mencari permodalan bagi KPM merintis usahanya.<sup>27</sup> Peran fasilitatif muncul dalam hal ini, dimana kesepakatan usaha dilalui berdasarkan keterampilan Pendamping Sosial dalam memfasilitasi kelompok KPM PKH didalam setiap pertemuan. Menurut Ife *Group Facilitation* yaitu kemampuan dalam memfasilitasi anggota dalam menentukan permasalahan, potensi dan membangun partisipasi anggota didalam kelompok agar tujuan tercapai secara efektif. Dalam penelitian ini, Pendamping sosial PKH melaksanakan keterampilannya memfasilitasi kelompok didalam P2K2, dengan membuat materi lebih menarik dengan caranya masing-masing, ada yang hanya menyampaikan sesuai isi modul, ada yang menyampaikannya dengan mengembangkan tema didalam modul dan dengan memanfaatkan potensi kelompok sebagai bahan diskusi sehingga tersamakannya persepsi dan partisipasi KPM dapat ditumbuhkan.<sup>28,29</sup>

Dengan pendekatan kelompok Pendamping Sosial PKH berusaha membuat KPM PKH saling mengungkapkan, berdiskusi dan menyepakati hal-hal yang memang harus diperbaiki, ataupun hal-hal yang disepakati harus dijalankan setiap pertemuan. Serta membuat KPM mengungkapkan keinginan-keinginan serta didiskusikan kembali cara untuk mencapainya. Setelah tahapan tersebut maka selanjutnya adalah bagaimana Pendamping Sosial PKH dapat menggali potensi yang dimiliki oleh KPM PKH seperti Ife katakan bahwa *Utilization of skills and resources* adalah keterampilan dalam mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki anggota dalam kelompok serta berbagai sarana atau prasarana yang mungkin dimiliki oleh suatu kelompok atau komunitas untuk digunakan dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok. Dalam hal ini Sebagian Pendamping Sosial PKH memanfaatkan keterampilan dan potensi yang dimiliki KPM dengan memberinya ruang untuk berkembang melalui tindak lanjut pendanaan,

---

<sup>27</sup> Utari, Utari. "Kinerja Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Dari Tahun 2014-2016." *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* 21.1 (2018).

<sup>28</sup> Wigati, Sri, dan Achmad Room Fitrianto. "Pendekatan Sustainable Livelihood Framework dalam rangka membongkar dominasi tengkulak melalui kegiatan keagamaan: study kasus pada pendampingan kuliah kerja nyata PAR 2012 di Desa Luworo Kecamatan Pilang Kencana Kabupaten Madiun." *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah* 14.2 (2013): 283-310.

<sup>29</sup> Yanti, Dini Fajar, dan Isbandi Rukminto Adi. "Analisis Process terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Cianjur dalam Kerangka Result-Based Management." *Empati Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 9.2 (2020): 147-163.

Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi pada Pendamping Sosial dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)

pemilihan usaha, dan pelatihan usaha sesuai minat dan kemampuan yang dimiliki KPM. Sudah ada kearah pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Pendamping Sosial PKH.

Dalam kolaborasi tersebut, maka Pendamping Sosial sudah menunjukkan peran representatif yang menurut Ife adalah kemampuan *community worker* untuk berinteraksi dengan orang-rang diluar komunitas atau kelompok untuk mewakili kepentingan kelompok/komunitas. Terdapatnya upaya dalam mencari sumber permodalan, pelatihan, yang berkaitan dengan materi didalam modul sebagai pengembangannya serta upaya peningkatan kapasitas usaha KPM PKH. Keterampilan yang dimiliki tersebut sesuai dengan keterampilan yang harus dimiliki meliputi *Obtaining Resources* yakni keterampilan untuk mengetahui alternatif bantuan atau pelayanan atau apapun yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah atau kebutuhan kelompok. Artinya sudah ada upaya dari Pendamping Sosial PKH dalam menjangkau dan menghubungkan KPM PKH dengan berbagai sumber seperti pelatihan, permodalan, ataupun pemberian materi didalam P2K2 sesuai dengan kebutuhan KPM PKH. Selanjutnya adalah keterampilan *networking* yang perlu dilakukan menurut Ife dalam mendukung peran representatif yakni kemampuan untuk membangun hubungan dengan berbagai orang dengan tujuan tertentu misalnya kemajuan kelompok atau komunitas untuk memperoleh dukungan dan dalam penelitian ini hanya Sebagian pendamping yang telah melakukan upaya berjejaring dengan pihak eksternal dan internal dalam rangka meningkatkan kapasitas KPM PKH untuk berfungsi sosial dan meningkatkan pendapatannya melalui usaha yang dijalankan secara mandiri atau kelompok. Artinya hanya sebagian kecil Pendamping Sosial PKH yang memiliki kemampuan ini dan telah melaksanakannya didalam proses pendampingan.<sup>30,31</sup>

### **Keterkaitan Latar Belakang Pendidikan Pendamping Sosial PKH dengan Proses Pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat keterkaitan dari latar belakang Pendidikan Pendamping Sosial PKH baik dari kesejahteraan sosial maupun nonkesejahteraan sosial. Keterkaitan didalam melaksanakan perannya dalam pendampingan sosial dan upaya pemberdayaan kepada KPM PKH. Sesuai dengan tahapan intervensi dalam Pekerjaan Sosial menurut Ashman yakni adanya proses *engagement*, suatu proses membangun hubungan profesional antara Pekerja Sosial dan penerima layanan yakni pekerja sosial memperkenalkan dirinya, pekerjaan dan instansi yang berkaitan dengan kliennya, mendeskripsikan jenis pelayanan

---

<sup>30</sup> Zastrow, Charles. *Eight Edition, The Practice of Social Work, a Comprehensive Worktext*. USA : Thomson Higher Education, (2007).

<sup>31</sup> Resnawaty, Risna, dkk. "Public Knowledge of Law Number 14 of 2019 on Social Worker and the Implementation of Social Work in Indonesia." *Asean Social Work Journal* (2022): 72-82.

Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi pada Pendamping Sosial dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)

yang sudah ditetapkan oleh instansi yang mempekerjakannya serta melihat harapan klien atas hasil dari pelayanan yang akan diberikan. Proses *engagement* dilakukan oleh semua Pendamping Sosial PKH dengan latar belakang kesejahteraan sosial dan sebagian kecil oleh Pendamping Sosial PKH dengan latar belakang pendidikan nonkesejahteraan sosial yang sudah memiliki pengalaman sebagai relawan sosial atau TKSK. *Engagement* dilakukan tidak hanya sebagai bentuk perkenalan satu sama lain, melainkan terdapat proses dimana Pendamping Sosial PKH berusaha membangun *trust* dari KPM PKH terhadap mereka untuk memudahkan mereka dalam memberikan pelayanan sosial selanjutnya terkait dengan program. Pendamping Sosial PKH dengan latar belakang Pendidikan nonkesejahteraan sosial yang belum memiliki pengalaman sebagai relawan sosial, hanya melakukan kontak kepada para ketua kelompok diawal penugasan mereka, dan ketua kelompok tersebut sudah terbentuk sebelumnya. *Trust* menjadi hal yang penting dalam proses pendampingan yang akan dilakukan terhadap klien. *Trust* termasuk kedalam modal sosial, dan studi Putnam menggambarkan bahwa pada suatu masyarakat dimana modal sosialnya itu besar, proses pembangunan di wilayah tersebut akan cenderung lebih baik (Adi, 2008) sehingga peran fasilitatif didalam kelompok maupun pendekatan secara individu dengan melakukan *home visit* sangatlah penting dilakukan mengingat bahwa tujuan jangka panjang dari PKH adalah mereduksi kesenjangan dan kemiskinan.

Pekerjaan sosial merupakan pekerjaan professional yang didalamnya terdapat kerangka *value, knowledge dan skill*. Pekerja sosial bertanggung jawab terhadap Lembaga profesi yang menaunginya tidak hanya kepada instansi yang mempekerjakannya.<sup>32,33</sup> Perbedaan cara yang dilakukan oleh para pendamping sangat erat kaitannya dengan perspektif pengetahuan yang dimilikinya. Pendamping dengan latar belakang Pendidikan nonkesejahteraan sosial tidak menjadikan hal tersebut penting dalam proses pertolongan kepada KPM PKH, mereka melihat hal tersebut hanya sebagai tugas dari atribut sebagai pendamping tanpa mengetahui dampak jangka Panjang yang ditimbulkan.<sup>34,35</sup> Kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan ketua kelompok dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan saat ini mereka melakukan *home visit* kepada KPM pun dikarenakan ada kewajiban harus memberikan *report* harian kepada Kementerian Sosial dengan melampirkan *geo tagging*. Ironis memang, namun demikian adanya.<sup>36</sup> Masih ada harapan disandarkan pada Pendamping Sosial PKH dengan latar belakang Pendidikan kesejahteraan sosial

---

<sup>32</sup> Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. "Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* 265 (2008).

<sup>33</sup> Holosko, Michael J. "The History of the Working Definition of Practice." *Research on social work practice* 13.3 (2003): 271-283.

<sup>34</sup> Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, (2012).

<sup>35</sup> Gulo, Nonivili Julianti. *Analisis Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2018.

<sup>36</sup> Huraerah, Abu. *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi Dynamic Governance*. Nuansa Cendekia, 2022.

Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi pada Pendamping Sosial dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)

dan mereka yang nonkesejahteraan sosial namun memiliki pengalaman sebagai relawan sosial. Meskipun dengan hasil yang belum maksimal namun sudah ada upaya dari mereka dalam memajukan kondisi sosial ekonomi KPM PKH.

Pendamping Sosial PKH dengan latar belakang Pendidikan Kesejahteraan Sosial sudah memiliki wawasan didalam memberdayakan KPM secara ekonomi dan sudah ada yang melakukan upaya tersebut. Sementara itu, Pendamping Sosial dengan latar belakang pendidikan nonkesejahteraan sosial sebagian besar, belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait KPM PKH untuk memiliki usaha dan belum melakukan upaya tersebut. Namun Pendamping Sosial yang memiliki pengalaman sebagai TKSK atau relawan sosial telah memiliki wawasan usaha dan melakukan upaya peningkatan ekonomi kepada KPM PKH.

Upaya Pendamping Sosial PKH menjadikan KPM graduasi sejahtera mandiri melalui P2K2, dalam penyampaian materi dan pemberian motivasi dengan cara mereka dan pemahaman mereka berdasarkan keilmuan mereka sendiri. Misalnya dalam hal ini sarjana komunikasi menjadikan situasi didalam kelompok lebih hidup pada saat pemberian motivasi dan melaksanakan diskusi terkait materi yang diberikan dengan mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk upaya penyadaran KPM PKH agar berkeinginan untuk menjadi lebih berdaya sesuai dengan Midgley yakni diperlukan upaya penyadaran serta partisipasi aktif dari masyarakat atau kelompok sasaran yang turut serta terlibat dalam proses pemberdayaan peran fasilitatif, edukatif dilakukan pada proses P2K2.<sup>37</sup>

Pendamping Sosial dengan latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial memiliki wawasan terhadap prinsip pekerjaan sosial generalis. Menurut Ashman terdapat tiga prinsip dalam melakukan praktek genralis yaitu *empowerment, strengths, resiliency*. Ketiga prinsip tersebut ditunjukkan dengan peran yang mereka lakukan dalam *setting* kelompok maupun individu. Pada proses pemberdayaan Pendamping Sosial PKH dengan latar belakang kesejahteraan sosial telah melakukan inisiasi dalam pembentukan kewirausahaan KPM dan bekerja bersama dengan pendamping lainnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri, dan keberanian mereka untuk memulai usaha, seperti yang diutarakan oleh Schwartz dalam Suharto Pekerja Sosial, individu, kelompok dan masyarakat perlu memiliki kemampuan dalam manajemen yakni merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengontrol. Kemampuan tersebut dilaksanakan agar proses dan tujuan pemberdayaan mencapai hasil yang optimal dan berdampak positif bagi individu, kelompok dan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan Pendamping Sosial PKH dari latar belakang Pendidikan apapun harus memiliki kemampuan dalam manajemen. Sehingga

---

<sup>37</sup> Midgley, James O. "Social development: The developmental perspective in social welfare." *Social Development* (1995): 1-208.

Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi pada Pendamping Sosial dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)

Pendamping Sosial dengan kata lain dapat dikatakan sebagai manajer perubahan dalam proses peningkatan daya KPM PKH baik sosial maupun ekonomi.<sup>38</sup>

Dalam memperoleh sumber untuk meningkatkan kemampuan KPM untuk melakukan kewirausahaan. Keterlibatan ini dilakukan oleh Pendamping Sosial PKH dengan latar belakang Pendidikan kesejahteraan social dengan melibatkan pendamping sosial PKH dengan latar belakang Pendidikan nonkesejahteraan sosial di wilayah kerja pada kecamatann yang sama. Pendamping mencari narasumber terkait pelatihan kewirausahaan untuk KPM PKH seta mencari tutor kewirausahaan untuk mendampingi para KPM yang akan merintis usahanya.<sup>39</sup> Selain itu mereka juga bersama-sama dalam hal penyelesaian kasus anak dari anggota PKH. Sudah terlihat bahwa Pendamping Sosial dengan latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial menekankan pada pola kerjasama dengan pendamping lainnya untuk menghubungkan KPM dengan hal-hal yang mereka butuhkan. Tugas ini termasuk dalam peran broker dalam pekerjaan sosial yakni salah satunya mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten dan mampu mengidentifikasi sumber-sumber yang tepat.

Kerangka pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan perannya sebagai broker tentunya haruslah dimiliki sebagai profesional dalam pekerjaan sosial. Sebelum Pendamping Sosial menghubungkan KPM dengan sumber yang dibutuhkan mereka sudah memfasilitasinya dalam kelompok untuk mengasesmen KPM dengan cara mereka masing-masing. Kemudian mencarikan sumber yang potensial untuk memenuhi kebutuhan KPM dan menghubungkannya. Hal ini masuk kedalam pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki seorang broker dalam melakukan asesmen sangat diperlukan untuk Pendamping Sosial PKH agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pelayanan kepada para KPM PKH. Proses asesmen dilakukan pada saat P2K2 menjadikan perannya sebagai fasilitator juga enabler dimana Pendamping harus memberikan kemungkinan-kemungkinan terhadap setiap kebutuhan KPM yang menjadi pilihannya.

Menurut Adi tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran yang berada dibawah garis kemiskinan dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil.<sup>40</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu pengetahuan yang memadai sebagai input untuk Pendamping Sosial maupun KPM PKH. Tidak hanya KPM PKH yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan usaha, Pendamping Sosial PKH juga membutuhkannya sebagai profesional yang langsung mendampingi KPM.

---

<sup>38</sup> Ife, Jim. *Social Work Theorist in Action*. London dan Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, (2005).

<sup>39</sup> Payne, Malcolm. *Social Work and Community Care*. London: Macmillan Press, (1995).

<sup>40</sup> Adi, Isbandi Rukminto. "Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan. Edisi Kedua." (2018).

Selanjutnya sebagai keterlibatan dari latar belakang Pendidikan, didapati Pendamping Sosial PKH dengan latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial dan nonkesejahteraan sosial yang memiliki pengalaman sebagai relawan social juga telah melakukan *networking* dalam upaya meningkatkan pengetahuan KPM PKH, memperloeh modal serta dalam hal pemasaran produk KPM. Pemasaran dilakukan di sekitar tempat tinggal, melalui bazar, melalui Jakpreneur, melalui Sentra Kemensos. Dengan demikian sudah adanya upaya yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan pendamping lainnya didalam kecamatan yang sama dalam hal pemberdayaan ekonomi KPM, agar KPM PH mandiri dan sejahtera. Meningkatkan kualitas hidupnya didalam keluarga maupun masyarakat. Meskipun berdasarkan hasil penelitian, tidak ada pembentukan koperasi simpan pinjam seperti yang dikatakan Majee dan Hoyt dalam Midgley bahwa sebagai tambahan terhadap dukungan bagi pembangunan ekonomi lokal, koperasi sangat berketerlibatan terhadap pembangunan sosial.<sup>41</sup> Koperasi juga membentuk tanggungjawab dan rasa kebersamaan terhadap kebutuhan kelompoknya, sehingga munculnya kesadaran untuk saling membantu dan saling mendukung agar dapat berkelanjutan.<sup>42</sup> Hal itu dikarenakan Pendamping Sosial merasa khawatir dengan pengumpulan uang didalam kelompok. Mereka khawatir hal tersebut menyalahi aturan didalam PKH. Namun sudah ada diantara mereka pada akhirnya menyadari kebutuhan akan wadah untuk para KPM memperoleh dana yakni keinginan untuk membentuk Yayasan.

Berdasarkan uraian diatas, sudah adanya keterlibatan dari latar belakang pendidikan Pendamping Sosial PKH dari latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial dan nonkesejahteraan sosial, meskipun masih sebagian kecil didalam upaya pemberdayaan. Selain itu, sudah terdapat kolaborasi antara pendamping dengan latar belakang kesejahteraan sosial dengan nonkesejahteraan sosial dalam upaya pemberdayaan, hal ini sejalan dengan Ashman bahwa pekerja sosial dapat menjalin proses kolaborasi dengan individu, klien dan profesional lainnya dalam tindakan intervensi yang akan dilakukan terhadap klien.

Kerangka nilai, pengetahuan dan keterampilan didalam proses pertolongan dengan melihat dimana *setting* mereka bekerja menjadi bagian tak terpisahkan dari pekerjaan sosial bahkan kerap kali harus dapat menyelesaikan berbagai persoalan kliennya. Dengan kerangka tersebut, pekerja sosial harus mampu berpikir kritis dengan kerangka yang mereka miliki untuk mewujudkan tujuan dari Program Keluarga Harapan.

---

<sup>41</sup> Midgley, James. *Pembangunan Sosial: Teori & Praktik*. Gadjah Mada University Press, 2020.

<sup>42</sup> Sporin, Max. *Introduction to Social Work Practice*. New York: Macmillan Publishing, (1975).

### **Keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap Peran Pendamping Sosial PKH dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri**

Keterlibatan dari Pemerintah Daerah yakni berupa program yang dibuat untuk mempermudah Pendamping Sosial PKH dalam menjalankan perannya terutama pada saat melaksanakan pemberdayaan ekonomi kepada KPM PKH. Kebijakan tersebut berupa program Jakpreneur sebagai pengganti dari program KUBE APBD sebelumnya pada bidang pemberdayaan di Suku Dinas Sosial Jakarta Timur. Sehingga saat ini, bantuan modal berupa hibah sudah ditiadakan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menghilangkan rasa ketergantungan KPM PKH terhadap anggaran pemerintah sekaligus mengurangi beban negara. Sejalan dengan Intervensi negara atas pembangunan sosial menumbuhkan rasa puas diri dan ketergantungan sehingga mengurangi rasa tanggung jawab individu dalam mewujudkan kesejahteraannya.<sup>43</sup> Hal ini sejalan dengan kesulitan yang dialami Pendamping Sosial PKH dalam menumbuhkan kesadaran KPM PKH yang sudah lama menjadi penerima bantuan sosial dan para KPM tersebut merasa bahwa bantuan sosial adalah sesuatu yang berhak mereka terima dari negara.

Saat ini Kota Jakarta Timur tidak memiliki dana hibah APBD untuk memberikan modal kepada KPM PKH atau masyarakat lainnya melainkan memberikan aksesibilitas permodalan melalui Jakpreneur dan kemitraannya pada Lembaga permodalan atau perbankan, karenanya diharapkan warga atau KPM PKH lebih bertanggungjawab terhadap dana yang dipinjamnya. Dengan demikian, Pendamping Sosial PKH adalah kunci membangun rasa tanggung jawab KPM dan membangun keberanian mereka untuk memulai usaha dengan mengupayakan dana-dana partisipatif atau swadaya. Sehingga memiliki keinginan dan kesadaran untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan menjadi pelaku usaha.

Dalam Jakpreneur yang menjadi target adalah KPM PKH potensial yang sudah memiliki rintisan usaha kurang lebih 6 bulan, dan KPM PKH yang telah graduasi dan memiliki usaha dengan asumsi agar usahanya dapat terus berlanjut melalui akses permodalan dan pendampingan usaha. Modal yang dipinjamkan tergantung hasil survey pendamping Jakpreneur ke rumah calon peminjam. Besarannya mencapai 10 juta, dan jika berkembang terus maka modal pinjaman dapat disesuaikan lagi. Bunga yang diberikan sangat rendah yaitu 6% per tahun. Sebelum memberikan pinjaman dengan terlebih dahulu diikutkan dalam pelatihan usaha baik dalam *soft skill* atau keterampilan.

Salah satu bentuk strategi pembangunan sosial oleh Lembaga/institusi yakni memaksimalkan kesempatan kerja mandiri diantara kaum miskin perkotaan. Pakar pembangunan sosial menerapkan strategi pembangunan ekonomi yang menghasilkan lapangan kerja produktif,

---

<sup>43</sup> Midgley, James. *Social Welfare in Global Context*. Sage, 1997.

dan wirausaha. Hal tersebut dirasakan pada program Jakpreneur, yakni Pemerintah Daerah berupaya menjalin Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan termasuk perhotelan untuk menjadi mitra kerja, Sehingga bagi masyarakat/ KPM PKH yang telah mengikuti pelatihan, misal memasak, maka akan bermitra dengan pihak hotel dalam penyediaan makan dan minum. Selain menyediakan mitra, Pemerintah Daerah juga telah berupaya menyediakan tempat pemasaran lokal bagi para KPM PKH yang ingin memasarkan produknya dengan terlebih dahulu dibantu dalam proses pembuatan label dan setifikasi halal.<sup>44</sup>

Keberadaan Jakpreneur membantu peran Pendamping Sosial PKH sebagai broker yakni menghubungkan system klien kepada sumber yang dibutuhkan namun pada kenyataannya karena koordinasi yang minim, menjadikan peran tersebut tidak maksimal dalam upaya memperoleh modal atau pelatihan dari Jakpreneur.

Proses koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pendamping Sosial PKH perlu ditingkatkan mengingat bahwa Pendamping Sosial PKH bekerja pada ranah sosial dan melaksanakan pekerjaan sosial sesuai dengan tujuannya pekerja sosial untuk menghubungkan orang dengan sistem yang memberi mereka sumber daya, layanan dan peluang dari tujuan tersebut sebagai pekerja sosial generalis Pendamping Sosial PKH harus memiliki ketrampilan dalam relasi sosial untuk membangun jejaring sebagai bagian dari peran representatif.

Bentuk pengawasan lainnya yang dilakukan yaitu Suku Dinas Sosial turut mengawasi kinerja Pendamping Sosial PKH. Sejauh ini, ada rasa kecewa dari pihak pemerintah daerah terkait kinerja pendamping PKH yang disinyalir memiliki pekerjaan lainnya. Hal ini membuat Pendamping Sosial PKH kesulitan melakukan pertemuan P2K2 dengan KPM pada hari kerja, selain itu – pada waktu tertentu masih ada Pendamping Sosial yang sulit diajak rapat kordinasi karena hal tersebut. Menurut pengamatan dari pihak Pemerintah Daerah Pendamping Sosial kurang optimal dalam melakukan pelayanan kepada KPM yang membutuhkan jawaban terkait bantuan sosial dikarenakan jam kerja yang tidak menentu karena seringkali datang siang. Kekecewaan ini sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara moral kepada Pendamping Sosial PKH.

Selanjutnya dukungan sarana dan prasarana diberikan kepada Pendamping Sosial PKH yaitu ruang sekretariat yang diberikan di Suku Dinas Sosial Jakarta Timur. Ruangan ini digunakan sebagai kantor dari Koordinator Kota serta digunakan untuk tempat berkoordinasi antar pendamping sosial, dengan pihak Pemerintah Daerah serta sebagai tempat melakukan pelayanan dan penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

---

<sup>44</sup> Zufri, Oktiano Regian. "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jombang." (2014).

Dengan adanya program Jakpreneur sebagai pengganti KUBE APBD, pengawasan kepada Pendamping Sosial PKH dan ketersediaan sarana prarana merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada peran Pendamping Sosial pada proses pemberdayaan KPM PKH.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah salah satunya adalah pemerintah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah berdasar atas tugas pembantuan. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka kewajiban Pemerintah Daerah dalam PKH bukan bersifat wajib. Namun jika dilihat dari sisi kebijakan sosial maka sudah seharusnya Pemerintah Daerah mempertimbangkan terkait bantuan permodalan bagi KPM PKH, sebagai *sharing budget* antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Mengingat pada fungsi pengaturan salah satunya adalah menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa yang artinya kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus. Selain itu juga terdapat fungsi pemberdayaan dimana pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi membantu peningkatan pendapatan masyarakat melalui dorongan akses dan bantuan permodalan.<sup>45</sup> Jakpreneur sudah mendorong kepada akses permodalan namun belum pada bantuan modal. Meskipun pada prinsipnya meminimalisir ketergantungan, namun tetap saja hal ini nampak masih menyulitkan pada upaya pencarian modal untuk KPM yang kondisinya masih dibawah garis kemiskinan.

Dengan kebijakan yang ada saat ini di tingkat lokal maka Peran Pendamping Sosial PKH menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan KPM PKH, dengan perannya didalam *primary setting* dimana pekerja sosial menjadi tokoh utama dalam melakukan pelayanan sosial dalam meningkatkan *social functioning* serta melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap KPM PKH .

Disisi lain, keberadaan tenaga professional menjadi hal yang sangat penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, karena partisipasi masyarakat masih berkaitan erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat benar adanya upaya penggalangan dana secara swadaya atau partisipatif dengan membentuk tabungan kelompok atau koperasi informal antar anggota PKH, sebagai bentuk partisipatif, dan dapat digunakan untuk menjadi modal usaha. Konsep ini sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial dimana pekerja sosial menolong klien agar klien tersebut dapat menolong dirinya sendiri.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan tujuan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Peran Pendamping Sosial PKH secara umum yang pertama yaitu memberikan materi, informasi,

---

<sup>45</sup> Maryani, Dedeh, dan Ruth Roselin E. Nainggolan. *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish, 2019.

motivasi dan pelatihan sederhana kepada KPM PKH yang dilakukan dengan pertemuan kelompok dan atau individu. Kedua, melakukan pemantauan terhadap data transaksi, pemantauan terhadap kondisi ekonomi KPM, dan pemantauan terhadap anggaran usaha yang dijalankan oleh KPM PKH. Ketiga, melakukan mediasi terhadap persoalan yang dialami KPM PKH dan keluarga dari KPM PKH tentang persoalan bantuan sosial PKH, komplementaritas program dan pelecehan seksual. Keempat, melakukan kolaborasi dengan sesama Pendamping Sosial PKH, dan mitra lainnya yaitu Kemensos dan di luar Kemensos RI. dalam pelatihan, permodalan, pemasaran dan penyelesaian kasus (2) Keterkaitan latar belakang pendidikan Pendamping Sosial PKH dalam melaksanakan perannya untuk mencapai graduasi sejahtera mandiri yang pertama yaitu terdapat keterkaitan pada upaya Pendamping Sosial PKH didalam melakukan pendekatan kepada KPM PKH. Kedua, terdapat keterkaitan pada wawasan dan upaya pada proses pemberdayaan ekonomi KPM PKH. Keterkaitannya yakni terdapatnya perbedaan dalam melakukan *engagement* untuk membangun *trust*, asesmen didalam kelompok, *networking* sebagai upaya pemberdayaan ekonomi, inisiatif kolaborasi dalam pembentukan kelompok usaha. Perbedaan tersebut nampak pada Pendamping Sosial PKH dengan latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial dan nonkesejahteraan sosial, juga Pendamping Sosial PKH nonkesejahteraan sosial dengan memiliki pengalaman sebagai relawan sosial. (3) Keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap peran Pendamping Sosial PKH dalam mencapai graduasi sejahtera mandiri antara lain terdapatnya Program Pemerintah Daerah berupa program Jakpreneur sebagai pengganti Bantuan Sosial KUBE APBD, terdapatnya pengawasan terhadap program dan Pendamping Sosial PKH, dan terdapatnya sarana prasarana pendukung.

Rekomendasi disampaikan kepada pihak-pihak terkait : (1) Kementerian Sosial, yaitu: (a) Proses rekrutmen calon Pendamping Sosial PKH dalam hal syarat utama bahwa tidak hanya Pendidikan dengan merangking nilai IPK melainkan berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dikerjakan di bidang social; (b) Rekomendasi selanjutnya adalah proses *realtime* kepada komposisi Pendamping dan penerima bantuan di Daerah, karena jika rasio pendampingan diabaikan sudah pasti Pendamping Sosial PKH tidak maksimal didalam menjalankan perannya dalam upaya pemberdayaan; (c) Akses informasi Pendamping Sosial PKH, terkait informasi-informasi yang diberikan dari Kementerian Sosial Pusat kepada tenaga pendamping lapangan, diharapkan informasi tersebut tidak bersifat berjenjang melainkan ada *platform online* untuk Pendamping seluruhnya se Indonesia, sehingga lebih efektif dan tidak ada miskomunikasi lagi antara Koordinator Kota dan Pendamping Sosial PKH; (d) Sebagai peningkatan kualitas Pendamping Sosial PKH, maka Kementerian Sosial perlu memberikan pelatihan kembali kepada mereka terkait peran sebagai agen perubahan dan terutama terkait dengan kewirausahaan KPM PKH. Hal ini dikarenakan wawasan Pendamping terhadap hal tersebut masih minim; (e)

Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi pada Pendamping Sosial dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)

Diperlukannya Standar Operasional Prosedur untuk memudahkan Pendamping Sosial PKH melakukan upaya pemberdayaan ekonomi, terutama dalam hal rekomendasi untuk memperoleh dana dari mitra lainnya seperti pogram *Corporate Social Responsibility*(CSR); (f) Perlu diperjelas kembali tugas dan fungsi dari Koordinator Kota yang lebih relevan serta efektif dalam upaya mencapai tujuan PKH.

(2) Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Timur, yaitu : (a) Perlu adanya Standar Operasional Prosedur dalam proses rekrutmen KPM PKH untuk menjadi anggota Jakpreneur yang melibatkan SDM PKH di Daerah. (b) Pemerintah Daerah perlu mendukung dalam hal biaya operasional bagi Pendamping Sosial PKH dalam perencanaan *sharing budget*. Hal ini dikarenakan tidak semua biaya operasional di anggarkan oleh Pemerintah Pusat.

dan, (3) Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, diharapkan ada penelitian terkait dengan implementasi kebijakan integratif PKH dan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dalam upaya meningkatnya sosial ekonomi KPM PKH.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. "Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat." (2015).
- Adi, Isbandi Rukminto. "Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan. Edisi Kedua." (2018).
- Afrilliana, Nadia. "Pengaruh Motivasi, Kompensasi, dan Kompetensi terhadap Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan di Sumatera Selatan." *Motivasi* 1.1 (2016): 79-94.
- David, Prima Darwin. *Praktik Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan untuk Graduasi Mandiri dari Status Kepesertaan*. Diss. Universitas Andalas, 2020.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, (2012).
- Firmansyah, Dinata, dan Fentiny Nugroho. "Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Tangerang Selatan." *Pekerjaan Sosial* 20.2 (2021).
- Gulo, Nonivili Julianti. *Analisis Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Habibullah, Habibullah. "Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 16.2 (2011).
- Holosko, Michael J. "The History of the Working Definition of Practice." *Research on social work practice* 13.3 (2003): 271-283.
- Huraerah, Abu. *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi Dynamic Governance*. Nuansa Cendekia, 2022.
- Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. "Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* 265 (2008).

- Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi pada Pendamping Sosial dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
- Ife, Jim. *Social Work Theorist in Action*. London dan Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, (2005).
- Ife, Jim. *Community development in an uncertain world*. Cambridge University Press, 2013.
- Khoiriyah, Nur. "Graduasi Mandiri: Bentuk Keberdayaan Penerima Manfaat (Kpm) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati." *Komunitas* 10.2 (2019): 143-156.
- Kirst-Ashman, Karen Kay. "Human behavior, communities, organizations, dan groups in the macro social environment." (*No Title*) (2008).
- Kiswati, Ayu. "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin melalui Kegiatan Rutin Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2k2) Kelurahan Blotongan, Sidorejo, Salatiga. Tahun 2020." (2020).
- Krefting, Laura. "Rigor in qualitative research: The assessment of trustworthiness." *The American journal of occupational therapy* 45.3 (1991): 214-222.
- Maryani, Dedeh, dan Ruth Roselin E. Nainggolan. *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish, 2019.
- Maulidah, Nisrina. *Implementasi Teknis Graduasi KPM PKH Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Grogol Utara Jakarta*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Midgley, James O. "Social development: The developmental perspective in social welfare." *Social Development* (1995): 1-208.
- Midgley, James. *Pembangunan Sosial: Teori & Praktik*. Gadjah Mada University Press, 2020.
- Midgley, James. *Social welfare in global context*. Sage, 1997.
- Nafatilona, Lidya. *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Administrasi Jakarta Utara*. Universitas Indonesia, (2011).
- Narayan-Parker, Deepa, ed. *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. World Bank Publications, 2002.
- Neuman, W. Lawrence. *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi 7. Jakarta: Indeks, (2013).
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th ed.)*. Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, (2014).
- Payne, Malcolm. *Social Work and Community Care*. London: Macmillan Press, (1995).
- Priyantiningtyas, Lailia. "Evaluasi Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Mewujudkan Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2013." *Majalah Ilmiah Dian Ilmu* 14.1 (2018).
- Purwanto, Slamet Agus, Sumartono Sumartono, dan Muhammad Makmur. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)." *Wacana Journal of Social and Humanity Studies* 16.2 (2013): 79-96.
- Rahmawati, Evi, dan Bagus Kisworo. "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* (2017): 161-169.
- Ramadhani, Putri Erika, dan Nandang Mulyana. "Peran Pendamping Dalam Pengembangan Usaha Kelompok Binaan Program Keluarga Harapan (PKH)(di Desa Lebakagung

Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi pada Pendamping Sosial dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)

Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2.1 (2020): 64-73.

Resnawaty, Risna, dkk. "Public Knowledge of Law Number 14 of 2019 on Social Worker and the Implementation of Social Work in Indonesia." *Asean Social Work Journal* (2022): 72-82.

Sahib, Munawwarah. "Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa." *Maqrizi: Journal Of Economics And Islamic Economics* 1.2 (2021): 1-13.

Siporin, Max. *Introduction to Social Work Practice*. New York: Macmillan Publishing, (1975).

Sompie, Maulida Eka Putri. "Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sungai Serut." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 1.3 (2022): 93-102.

Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta, (2020).

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung: PT.Refika Aditama, (2005).

Suleman, Syahputra Adisanjaya, dan Risna Resnawaty. "Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.1 (2017): 88-92.

Suradi, Suradi, dan Benedictus Mujiyadi. "Kinerja Pendamping Sosial pada Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Tarakan." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 7.3 (2018): 130-145.

Utami, Isti Putri, dkk. "Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung." *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 5.1 (2021): 19-25.

Utari, Utari. "Kinerja Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Dari Tahun 2014-2016." *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* 21.1 (2018).

Wigati, Sri, dan Achmad Room Fitrianto. "Pendekatan Sustainable Livelihood Framework dalam rangka membongkar dominasi tengkulak melalui kegiatan keagamaan: study kasus pada pendampingan kuliah kerja nyata PAR 2012 di Desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun." *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah* 14.2 (2013): 283-310.

Yanti, Dini Fajar, dan Isbandi Rukminto Adi. "Analisis Process terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Cianjur dalam Kerangka Result-Based Management." *Empati Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 9.2 (2020): 147-163.

Zastrow, Charles. *Eight Edision, The Practice of Social Work, a Comprehensive Worktext*. USA : Thomson Higher Education, (2007).

Zufri, Oktiano Regian. "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jombang." (2014).